

DAFTAR PUSTAKA

- R. SUGANDHI, 1981, "KUHP DAN PENJELASANYA", Usaha Nasional, Surabaya.
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia. Jakarta. 2003;
- Supomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 1999
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009
- Henry Donald Lbn., *Efektivitas hukum penyimpanan barang sitaan Dirupbasan*, Toruan. 2021
- Lollong Manting, Pantja bambang Sudarwanto, *Analisis Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Dalam rumah Penyimpanan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara(Rupbasan)*, 2021
- Mudjirah, *Pokok 2 pokok Kebijakan tentang Pengelolaan Basan dan Baran di RUBASAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Rusli, Muhammad, *Sistem peradilan pidana Indonesia*, UII Press, Jakarta, 2007
- Terry, George R. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Bumi Aksara, Jakarta, 2009
- Nugroho J. S, *Perilaku Konsumen*, Edisi Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2003
- Moenir, H.AS, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Bumi Aksara. Jakarta 2008
- Amalia. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure di Bursa Efek Indonesia*. Media Riset Akuntansi Vol 3 No 1, 2013

Peraturan Perundang - Undangan

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja RUTAN dan RUPBASAN;

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-002/A / JA/ 05 / 2017 TENTANG PELELANGAN DAN PENJUALAN LANGSUNG SITAAAN ATAU BARANG RAMPASAN NEGARA ATAU BENDA SITA EKSEKUSI

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikas.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Peraturan Bersama Kapolri, Jaksa Agung RI, KPK RI, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Mahkamah Agung RI Dan Menteri Keuangan RI No: 2 Tahun 2011, No: KEP/259/A/JA/12/2011, No:KEPB-01/01-55/11/2011, No: M.HH-10.HM.03.02 Tahun 2011, No :199/KMA/SKB/XI tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 160).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997. Tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

